**RELASI KEKUASAAN DAN BENTUK TUTURAN**

Oleh : Suharyo

**ABSTRAK**

Kekuasaan pada masyarakat modern tidak lagi ditunjukkan lewat kekuatan fisik yang represif, tetapi lewat kekuasaan yang tidak tampak, tetapi laten yaitu lewat bahasa. Cobalah dilihat betapa Presiden Soeharto lewat kekuatan bahasanya mampu merepresi kognisi masyarakat lewat jargon-jargon : Pancasila, UUD 45, Repelita, pembangunan nasional, stabilitas nasional, bahkan ucapan ***ken*** menjadi model tuturan/pidato mulai dari tingkat pusat sampai tingkat RT. Bahkan kita kenal ungkapan demokrasi Pancasila, dan nama lembaga: Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi bahasa bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai alat kekuasaan (Thomson, 2003: 83).Sebagai alat kekuasaan, komunikasi (bahasa), misalnya, tidak hanya untuk sekadar dipahami; tetapi juga untuk dipercayai, dipenuhi, dituruti, dihormati, dan dibedakan.

Fenomena di atas juga terjadi pada Orde Reformasi sekarang ini. Pada era ini bahkan reformasi cenderung dipahami sebagai kebebasan yang “nyaris” tanpa batas. Kebebasan ini pada gilirannya berimplikasi pada penggunaan bahasa. Bahasa, terutama dalam era ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi belaka, tetapi sudah menjadi salah satu alat untuk memperebutkan kekuasaan lewat pertarungan wacana.

Untuk mengungkap ada atau tidaknya relasi kekuasaan dan bentuk tuturan, di sini digunakan

metode simak yang dilanjutkan dengan teknik catat yang selanjutnya data dianalaisis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Hasilnya adalah secara signifikan bahwa antara bahasa (bentuk tuturan) dan kekuasaan terdapat relasi. Dalam mewujudkan relasinya, para politikus menggunakan piranti linguistik berupa diksi dan pemfokusan.

**Kata kunci: *relasi, kekuasaan, bentuk tuturan***

1. **Latar Belakang**

Kekuasaan merupakan konsep abstrak, tetapi sangat berpengaruh dalam setiap sendi kehidupan.Moore dan Hendry (via Ibrahim, 2007: 18) menyebutnya sebagai kekuatan dalam masyarakat yang membuat tindakan terjadi sehingga kita bisa mengenali siapa yang mengendalikan apa dan demi kepentingan siapa. Kekuasaan ini dilakukan oleh orang-orang seperti polisi, tentara, politikus, hakim, sipir. Ada juga kelompok masyarakat lain yang memiliki kekuasaan lewat hati nurani dan moral, seperti pendeta, ustad, dan guru. Kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat sering disebut sebagai kekuasaan sosial, sedangkan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, seperti pendeta, ustad, dan guru sering disebut kekuasaan personal.

Kekuasaan pada masyarakat modern tidak lagi ditunjukkan lewat kekuatan fisik yang represif, tetapi lewat kekuasaan yang tidak tampak, tetapi laten yaitu lewat bahasa. Cobalah dilihat betapa Presiden Soeharto lewat kekuatan bahasanya mampu merepresi kognisi masyarakat lewat jargon-jargon : Pancasila, UUD 45, Repelita, pembangunan nasional, stabilitas nasional, bahkan ucapan ***ken*** menjadi model tuturan/pidato mulai dari tingkat pusat sampai tingkat RT. Bahkan kita kenal ungkapan demokrasi Pancasila, dan nama lembaga: Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi bahasa bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai alat kekuasaan (Thomson, 2003: 83).Sebagai alat kekuasaan, komunikasi (bahasa), misalnya, tidak hanya untuk sekadar dipahami; tetapi juga untuk dipercayai, dipenuhi, dituruti, dihormati, dan dibedakan.

Kekuasaan dapat dimaknai sebagai kemampuan invidu atau kelompok masyarakat untuk membatasi keinginan individu/kelompok masyarakat lainnya. Sementara Weber menyatakan bahwa kekuasaan merupakan peluang seseorang/institusi untuk melakukan pemaksaan terhadap pihak lain agar mengikuti kehendaknya (lihat Stone, 1986: 79; Galtung via Maran dan Effendi, 2003). Kekuasaan juga cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan (perang), sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan yang sering dartikan sebagai dominasi. Dominasi merupakan suatu bentuk hubungan kekuasaan dengan menempatkan si penguasa “berhak” memerintah, sedangkan yang “diperintah” menerimanya tanpa landasan kesadaran yang utuh. Marx memberikan ilustrasinya pada dominasi kelas sosial. Kelas yang dominan mengemban dan mengambil alih bentuk-bentuk ideologi yang mengabsahkan dominasi. Kekuasaan juga tidak dapat dilepaskan dari hegemoni yang merupakan kekuasaan atau kemenangan dalam pertarungan yang tidak disadari (oleh pihak yang “dikuasai”) dan diperoleh melalui “konsensus”. Untuk memperoleh hegemoni tersebut, diperlukan adanya legitimasi. Legitimasi ini dapat berbentuk budaya, lembaga, atau kitab yang dianggap benar (Maran dan Effendi, 2003: 121 – 122).

Dalam realisasinya, bahasa sebagai alat kekuasaan mengejawantah dalam proses komunikasi baik yang bersifat transasional maupun interaksional (Brown dan Yule, 1983). Dalam konteks ini, bahasa menyediaakan unsur- unsur yang memungkinkan pembicara melakukan tindak tutur dan strategi tutur untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan bahkan menguasai pikiran dan perasaan mitratuturnya. Gejala ini dapat dijumpai dalam berbagai kehidupan sosial, pilitik, ekonomi,agama, penidikan, dan budaya(George Orwell via Ibrahim, 2006: 50).

Pada kajian wacana, gejala ini dapat muncul pada interaksi kelas sosial, antarkelompok dalam suatu lembaga, interaksi antaretnik, hubungan antargender, dan bahkan hubungan orangtua-anak (Fairclough, 1998: 34). Lebih luas lagi van Dijk (1998 : 5) menyatakan bahwa kekuasaan dapat terjadi pada semua aspek kehidupan, seperti di kalangana militer, hubungan kelas, ras gender, dan para jurnalis.

Jika diperhatikan sejak dimulai Orde Reformasi fenomena yang sangat tampak adalah kebebasan yang nyaris tanpa batas terus bergulir. Orde reformasi bisa dilihat sebagai sebab dan juga akibat. Sebagai sebab, Orde Reformasi telah menampilkan dirinya dalam sosok yang “liar”. Akibatnya, reformasi menjadi dalih untuk pemebenaran atas tingkah laku seseorang atau kelompok. Hal itu,misalnya, dapat diamati perilaku politikus yang terekam lewat pemberitaan di media massa. Fakta dan realitas bisa dijungkirbalikkan sedemikian rupa, sehingga jika tidak cermat bisa bingung dalam menyikapinya. Sebab, realitas yang sama disajikan secara berbeda dalam teks/wacana. Sebab, wacana tidak hanya sebagai fakta kebahasaan, tetapi sesungguhnya lebih dari itu adalah realitas yang diproduksi oleh seseorang atau kelompok yang di belakangnya terdapat berbagai kepentingan.Kepentingan-kepentingan itu lalu memunculkan beragam wacana yang semuanya mengaku” paling benar”. Cobalah disimak pemberitaan tentang kasus Nazarudin. Ketika kali pertama diinterogasi, Nazarudin menyebut sejumlah nama para petinggi partainya (kala itu), seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh. Akan tetapi, apa jawaban mereka terhadap kesaksian Nazarudin. Anas Mengatakan, “Itu dagelan, bukan kesaksian.”, Kalau saya korupsi satu rupiah pun, “Saya siap digantung di Monas.”, Andi Malarangeng mengakan bahwa kesaksian Nazarudin tidak benar , Angie menolak dikatakan telah melakukan percakapan dengan Mindo dengan jelas mengatakan bahwa dia baru memiliki BB tahun 2010. Sementara, kesaksian Yulianis, Mindo, dan Nazarudin mengatakan sebaliknya. Dari sini tampak bahwa terjadi pertarungan wacana dalam merebut hegemoni semantik dengan berbagai dalih dan argumentasinya. Dari sini pula dapat diketahui terdapat relasi kekuasaan dan bentuk tuturan. Makalah ini akan mencoba menelusuri hal tersebut.

1. **Masalah**

Masalah yang akan dicoba diuraikan dalam makalah ini adalah relasi kekuasaan dan bentuk bahasa. Bentuk bahasa dalam makalah ini satuan-satuan bahasa seperti diksi, bentuk kalimat, struktur sintaksis, dan pemfokusan.

1. **Tujuan**

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk linguistk yang digunakan oleh politikus dalam wacana berita dalam menanggapi berbagai isue poliotik.

1. **Metode**

Data dalam tulisan ini dikumpulkan dengan melalui metode simak yang dilanjutkan dengan teknik catat. Penulis melakukan penyimakan sejumlah berita yang memuat berita politik yang ramai dibicarakan. Misal, berita tentang kasus Nazarudin, kenaikan harga BBM, dan kasus Hambalang. Hasil penyimakan tersebut lalu dicatat di dalam kartu-kartu data. Setelah data terkumpul dilakukan analisis denhan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis.

1. **Kerangka Teoretik**

Berikut disajikan konsep-konsep teoretik yang dijadikan landasan berpikir dalam tulisan ini.

**5.1 Konsep Wacana dan Kekuasaan**

Bagi Foucault (via Eriyanto, 2011) wacana tidak dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu. Dari pandangan ini pulalah muncul tesis Foucault bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”, tetapi dalam praktik. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasikan lewat pengetahuan dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelengara kekuasaan (partai penguasa/pemerintah) selalu memproduksi pengetahuan sebagai bias dari kekuasaannya. Pengetahuan bukan merupakan pengungkapan yang samar-samar dari relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Pada gilirannya, wacana (tertentu) menghasilkan pengetahuan dan kebenaran (tertentu) yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran bagi Foucault tidak datang dari langit, tetapi ia diproduksi oleh penguasa yang disebarkan lewat wacana yang dibentuknya. Jadi, khalayak tidak dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat fisik, tetapi lewat wacana Misal, wacana yang berupa prosedur, aturan, tata cara, surat edaran, dan produk hukum lainnya.

Kekuasaan di dalam masyarakat modern tidak dilakukan secara eksplisit, terang-terangan, tetapi justru secara tersamar lewat praktik “pendisiplinan”. Lewat disiplin tersebut, khalayak dikontrol tanpa mereka sadari. Kontrol dan membentuk individu yang patuh dan disiplin adalah wujud kekuasaan di mana-mana. Kekuasaan selalu beroperasi melalui konstruksi berbagai pengetahuan. Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan pengetahuan di sisi lain terjadi. Foucault (via Eriyanto, 2011) menjelaskan bahwa ahubungan antara simbol dan yang disimbolkan bukan hanya lewat referensial, melainkan lewat produksi dan kreasi. Simbol yang dihasilkan (baca: wacana) antara lain melalui bahasa, moralitas, hukum, agama yang tidak hanya mengacu pada sesuatu, tetapi ikut menghasilkan perilaku, nilai-nilai, dan ideologi. Kehidupan bukan diatur lewat serangkaian represi, melainkan melalui kekuatannya memberi definisi dan melakukan regulasi. Individu tidak hanya didefinisikan, tetapi juga dibentuk,dikontrol, dan disiplinkan.

**5.2Produksi Wacana**

Studi analsisis wacana bukan sekedar mengenai pernyataan (kumpulan kalimat), melainkan juga mengkaji struktur dan tata aturan dari wacana dalam mengekpresikan realitas. Realitas bagi Foucault (via Eriyanto, 2011) merupakan seperangkat kontruk yang dibentuk melalui wacana. Wacana membatasi bidang pandangan kita. Contoh tentang realitas/objek PKI. Pada masa Orla merupakan partai yang diakui Pemerintah bahkan termasuk 5 partai terbesar pada saat itu, tetapi pada masa Orba merupakan partai terlarang. Melihat contoh ini menunjukkan bahwa wacana pada hakikatnya adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang dominan dan masyarakat yang marginal. Implikasinya, terdapat wacana utama (dominan) dan wacana marginal/tandingan.

Sebagai praktik sosial, salah satu elemen bahasa adalah kosakata. Kosakata dalam perspektif analisis wacana kritis bukan hanya sebagai satuan bahasa, melainkan bisa dimaknai (1) untuk membuat klasifikasi, (2) membatasi pandangan, (3) sebagai arena pertarungan (wacana), dan (4) sebagai alat untuk meminggirkan kelompok tertentu seperti diuraikan berikut ini.

**5.2.1 Kosakata : Membuat Klasifikasi terhadap Realitas**

Bahasa pada dasarnya selalu menyediakan klasifikasi. Realitas tertentu dikategorisasikan sebagai “X” dan akhirnya dibedakan dengan realitas yang lain. Klasifikasi menyediakan arena untuk mengontrol informasi dan pengalaman. Kata kemudian memaksa kita untuk melihat bagaimana realias seharusnya dipahami.

* + 1. **Kosakata : Membatasi Pandangan Penutur terhadap Realitas**

Bahasa pada dasarnya bersifat membatasi-kita diajak berpikir untuk memahami seperti itu, bukan yang lain. Klasifikasi menyediakan arena untuk mengontrol informasi dan pengalaman. Kosa kata beroengaruh terhadap bagaimana kita memahami dan memaknai suatu peristiwa.

**5.2.3 Kosakata : Pertarungan Wacana**

Kosakata haruslah dipahami dalam konteks pertarungan wacana. Dalam suatu pmberitaan, setiap pihak memiliki versi / pendapat sendiri-sendiri atas suatu masalah. Mereka memiilki klem kebenaran dasar pembenar dan penjelas mengenai suatu masalah. Mereka bukan hanya mempunyai versi yang berbeda, tetapi juga berusaha agar versinya yang dianggap benar dan lebih menentukan dalam mempengaruhi opini publik. (140)

**5.2.4 Kosakata : Marginalisasi/Meminggirkan Kelompok Tertentu**

Argumen dasar dari Fowler, dkk. (via Badara, 2012) adalah bahwa pilihan linguistik tertentu, seperti : kata, kalimat, proposisi,-membawa nilai ideologis tertentu. Kata dipandang bukan sebagai sesuatu yang netral, tetapi, membawa implikasi ideologis tertentu. Di sini, pemakaian kata, kalimat, susunan, dan bentuk kalimat tertentu, proposisi tidak dipandang semata sebagai persolan teknis tata bahasa atau linguistik, tetapi ekspresi dari ideologi : upaya untuk membentuk pendapat umum, meneguhkan, dan membenarkan pihak sendiri dan mengucilkan pihak lain. Pemakaian bahasa dipandang tidak netral karena membawa implikasi ideologis tertentu.

**5.3** **Analisis Wacana versus Analisis Wacana Kritis**

Paling tidak ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. *Pandangan pertama,* diwakili oleh aliran *positivisme-empiris* yang melihat bahasa dipandang sebagai jembatan antara manusia dan objek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan baasa tanpa ada kendala atau distorsi, sejauh dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaktis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahaui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya sebab yang penting apakah pernyataan tersebut disampaikan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantik. *Pandangan kedua*, konstruktivisme. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Panndangan ini menolak pandangan empirisme/positivisme yang memisahkan subjek dan abjek bahasa. Bagi alisan ini, bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka, tetapi justru menganggap bahwa subjek merupakan faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Bahasa dipahami dalam paradigma ini (konstruktivisme) diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan penciptaan makna. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analaisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Maksud yang tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. *Pandangan ketiga*, pandangan kritis. Analaisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidakbenaana struktur tata bahasa tetapi lebih menekankan pada konstelasi kekuatan ayang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral karena sangat berkaitan dengan kekuatan sosial yang ada pada masyarakat. Dengan demikian, bahasa tidak dipahami sebagai medium yang netral, tetapi sebagai representasi yang berperan mebnetuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu. Oleh karena itu, analisis wacana digunakan untuk membongkar (ke)kuasa(an) karena bahasa selalu terkait dengan kekuasaan (Eriyanto, 2011).

Paradigma pluralis melihat wartawan dan media sebagai entitas yang otonom. Sementara, paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Perbedaan keduanya, ditampilkan dalam bentuk tabel berikut (yang diadaptasi dari Eriyanto, 2011).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PANDANGAN PLURALIS** | **ASPEK** | **PANDANGAN KRITIS** |
| Ada fakta yang real yang diaatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal  | FAKTA | Fakta merupakan hasil dari suatu proses petarunhgan antara kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang ada dalam masyarakat |
| Berita adalaah cermin dan refkeksi dai kenyataan, karenanya harus sama dengan kenyataan | Berita bukan meupakan cermin dan refleksi dari realitas karena dipenagruhi oleh kepentingan kekuatan yang dominan (penguasa) |
| Media merupakan sarana yang bebas dan netral tempat semua kelompok masyarakat untuk berdiskusi secara simeteris | POSISI MEDIA | Media hanya dikuasai oleh kelompok dominan dan menjadi sarana untuk memojokkan/memarginalkan kelompok lain |
| Media menggambarkan disksui apa yang ada di masyarakat. | Media hanya dimanfaatkan dan menjadi alat kelompok dominan. |
| Nilai dan ideologi wartawan berada di luar proses peliputan berita | POSISI WARTAWAN | Nilai dan ideologi wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dana pelaporan suatu peristiwa. |
| Wartawan berperan sebagai pelapor | Wartawan berperan sebagai partisipan dari kelompok yang ada di masyarakat |
| Tujuan peliputan dan penulisan berita: eksplanasi dan menjelaskan apa adanya  | Tujuan peliputan dan penulisan berita : keberpihakan pada kelompok tertentu |
| Penjaga gerbang (*gatekeeping*) | Sensor diri |
| Landasan etis | Landasan ideologis |
| Profesionalisme sebagai keuntunhan | Profesionalisme sebagai kontrol |
| Wartawan sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran | Sebagai pekerja yang mempunyai posisi berbeda dalam kela sosial |
| Liputan dua sisi, dua pihak, dan kredibel | HASIL LIPUTAN | Mencerminkan ideologi wartawan dan kepentingan sosial, ekonomi, atau politik tertentu. |
| Objektif, menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pemberitaan | Tidak objektif dari mewakili kelompok/struktur sosial tertentu yang lebih besar/dominan |
| Menggunakana bahasa yang tidak menimbulkan multitafsir. | Bahasa yang digunakan menunjukkan dari kelompok tertentu (dominan) dan memarginalkan kelompok lain |

1. **Hasil dan Pembahasan**

Bahasa sesungguhnya selalu dalam konteks relasi. Dalam kata meminjam, misalnya, peluluhan /p/ menjadi /m/ karena disetntukan oleh relasinya secara fonetis. Peluluhan tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Sebab, antara /p/ dan /m/ sama-sama bunyi bilabial. Artinya, sama artikulasi dan artikulatornya. Relasi bahasa bisa terjadi dalam konteks sintagmatik (linear) ataupun paradigmatik (vertikal). Misal, pada kalimat (1) *Pejabat itu membantah terlibat kasus korupsi* terdapat relasi antara **Subjek** (*pejabat itu*),**Predikat** (*membantah)*, dan **Pelengkap** (*terlibat kasus korupsi*). Secara paradigamtik, kalimat tersebut dapat diganti, konstituen *pejabat itu* dapat disubstitusi dnegan konstituen *Andi*, *membantah* diganti *mengakui*, dan *terlibat dalam korupsi* disubstitusi *perbuatan itu*, sehingga membentuk kalimat baru, yaitu (2) *Andi mengakui perbuatan itu* .

Relasi sintagmatik dan paradimatik juga membawa implikasi terhadap makna. Makna tersebut diketahui karena relasi antarkonstituen.Pada kalimat (1) S bermakna sebagai pelaku, P bermakna melakukan perbuatan (membantah), dan Pelengkap bermakna tindakan (terlibat dalam korupsi). Secara paradigamtik konstituen pada kalimat (1) dan (2) dapat disubstitusi karena memiliki kategori yang sama yaitu nomina pada Subjek, verba pada Predikat, dan nomina pada pelengkap.

Dalam konteks tuturan relasi bahasa dapat dilihat dalam hubungannya dengan faktor eksternal, misalnya ideologi, politik, dan kekausaan; relasinya dapat diketahui dari (paling tidak) diksi atau pilihan kata dan pemfokusan.

**6.1 Relasi Kekuasaan dengan Diksi**

Kalimat di bawah ini menunjukkan adanya relasi kekuasaan dan pilihan kata yang dilakukan oleh penutur (politikus).

1. Dalam berbagai kesempatan Anas *membantah*  menerima dana dari PT Group Permai dan mengatakan bahwa semua itu hanya *dagelan*, *bukan kesaksian*.
2. Mallarangeng *membantah* terlibat dalam kasus Hambalang.
3. Mallarangeng mengatakan bahwa ucapan Nazarudin *tidak benar*.
4. Ketua advokasi dan bantuan hukum pengurus pusat partai Demokrat (Denny Kailimang) mengatakan bahwa sejauh ini (kesaksian Mindo dan Nazarudin) hanyalah *tudingan tanpa dasar*.
5. Tudingan-tudingan selama ini hanya untuk *mengusik* partai Demokrat.
6. Wakasekjen partai Demokrat, Saan Mustopa *menuding* kasus ini (Hambalang) dipakai *untuk mendiskreditkan* Partai Demokrat dan pemerintah pada umumnya.
7. Mindo mengaku pernah *melihat* mobil dengan plat AU (Anas Urbaningrum) di kantor Permai Group.
8. Ia (Mindo) juga *membenarkan* sebutan ketua besar merujuk AU.
9. Mindo juga *menyebutkan* nama unsur pimpinan banggar DPR (Mirwan Amir, Mahyudin, Angelina Sondakh, I Wayan Koster, Sutan BathoeganaAndi Mallarangeng, Choel Mallarangeng).
10. Mindo *mengakui* isi percakapan BBM dengan Angie.
11. Angie *membantah* telah melakukan percakapan melalui BB.
12. Angie *mengatakan* baru memiliki BB pada tahun 2010.

Relasi kekuasaan dan bentuk tuturan yang tersaji pada sebelas kalimat di atas sangat tampak. Hal itu terlihat diksi yang digunakan oleh penguasa partai/pejabat. Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng memilih kata *membantah, hanya dagelan, bukan kesaksian, tidak bena*r karena mereka merasa memiliki kekuasaan yang (lebih) besar. Hal yang sama juga dilakukan oleh petinggi Partai Demokrat lainnya (Denny K dan Saan Mustofa) yang sengaja memilih kata/frasa *tudingan tanpa dasar, menuding, mengusik, dan mendiskreditkan.* Kesemua diksi yang dilakukan oleh para petinggi Partai Demokrat tersebut karena mereka merasa memiliki kekuasaan yang besar dan kuat sehingga berusa mempengaruhi publik bahwa apa yang dikatakan lawan politiknya adalah tidak benar. Hal itu bebrbeda dengan kalimat lainnya (8) sampai dengan (10) dengan Subjek Mindo. Dia memilih kata membenarkan, menyebutkan, melihat, dan mengakui (melakukan pembicaraan dengan Angie melalui BB) dengan maksud untuk memperingan hukuman dan sekaligus menyeret orang lain untuk sama-sama menanggung risiko/memikul beban atas kasus yang dialaminya, sehingga dipilihlah kata-kata tersebut. Tentu hal ini berbeda dengan pilihan kata Angie yang menggunakan kata yang menegasikan pilihan kata Mindo. Angie memilih kata *membantah* dan *mengaku* (baru memiliki BB padda tahun 2010).

* 1. **Relasi Kekuasaan dengan Pemfokusan**

Selain dapat diketahui lewat diksi, relasai kekuasaan dan bentuk tururan juga dapat dilihat lewat pemfokusan seperti ditunjukkan kalimat (13) sampai dengan (19) berikut ini.

13. Pemerintah menyediakan dana sekitar 22 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

14. Pemerintah merencanakan empat program kompensasi bagi masyarakat.

1. Alasan klasik yang tidak masuk akal.
2. Seharusnya Pemerintah mencari solusi yang cerdas dan mendasarkan pada kepentingan nasional*.*
3. Semua kebutuhan naik, ini memberatkan bagi *rakyat miskin.*
4. Warga mengeluhkan harga bahan pokok sejak ada rencana Pemerintah menaikkan harga BBM.
5. Rencana kenaikan harga BBM mendorong kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional.

Dengan memberikan tekanan atau fokus pada *pemerintah menyediakan dana sekitar 22 triliun* dan *pemerintah menyiapkan empat program* bukan tanpa alasan. Pemerintah dalam hal ini ingin memberikan citra yang positif bahwa Pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani masalah kemiskinan sebagai dampak dari rencana kenaikan harga BBM. Hal yang sebailknya terjadi pada kelompok Oposisi dan atau atau kaum marginal. Kelompok Oposisi lebih memfokuskan *alasan klasik* (harga minyak dunia naik) dan *solusi yang cerdas* sebagai pembenaran untuk menaikkan harga BBM dalam negri. Dengan pemfokusan tersebut, Oposan ingin menjelaskan ke publik bahwa Pemerintah/Partai Penguasa tidak “kreatif” dan “bodoh”. Perbedaan pemfokusan ini karena aspek kekuasaan dan target serta maksud yang tersembunyi dari masing-masing kubu/kelompok dalam upayanya “merebut”

Panggung politik lewat pertarungan wacana. Hal yang sama dilakukan oleh kaum marginal.Lebih memfokuskan “penderitaan, kemiskinan, dan dampak kenaikan BBM” seperti tergambar pada kalimat (17) sampai (19) di atas, yaitu *semua kebutuhan naik, semua warga mengeluhkan semua harga bahan pokok, dana rencana kenaik harga BBM*.

1. **Simpulan**

Uraian di atas telah menunjukkan bahwa terdapat relasi antara kekuasaan dengan bentuk tuturan secara signifikan. Kesignifikasiannya terlihat pada diksi yang dipilih antara Penguasan dan Oposisi serta kelompok marginal sangat berbeda, seperti ditunjukkan pada kalimat (1) sampai dengan (12). Begitu juga dalam hal pemfokusan. Fokus yang dipilih oleh penguasa adalah lebih menonjolkan program dan penyediaan dana yang besar untuk mengatasi timbulnya gejolak jika harga BBM dinaikkan, sedangkan kaum Oposan lebih mengedepankan kebijakan pemerintah yang tidak benar bahkan sebuah kebodohan. Sementara, kelompok marginal memilih kemiskinan dan dampak yang timbul sebagai fokus. Baik diksi maupun pemfokusan yang digunakan/dilakukan oleh Parta Penguasa, Oposan, kelompok marginal sesuangguhnya terdapat maksud tersembunyi yang ada di balik semua tuturan tersebut. Maksud tersebut adalah “berebut kekuasaan” lewat pertarungan wacana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media.* Jakarta: Kencana.

Brown, Gillian and Yule, George. 1983. *Discourse Analysis.* Cambridge: Cambridge University Press.

Eriyanto. 2000. *KekuasaanOtoriterdariGerakanPenindasanMenujuPolitikHegemoni: StudiatasPidato-pidatoPolitikSoeharto.* Yogyakarta: PustakaPelajar.

Fairclough, Norman. 1995. *Crtical Discourse Analysis: The Critical Study of Language.* London: Longman.

-----------. 2003. *Language and Power (*Terjemahan Indah Rohmani). Malang: Boyan.

Fiske, John. 1990. *Cultural and Communication Studies* (Terjemahan Idi Subandi Ibrahim, Ed.). Yogkarta: Jalasutra.

Hiariej, Eric. 2008. “PemulihanKekuasaanKelasDominandanPolitikNeoliberalisme”. Dalam*Global (jurnalPolitikInternasional), Vol. 9, No.2.* Jakarta: DepartemenIlmuHubunganInternasional FISIP, Universitas Indonesia.

Jumadi. 2005. *Representasi Kekusaan dalam Wacana Kelas*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Latif, Yudidan Idi Subandi Ibrahim. 1998. *BahasadanKekuasaan*. Jakarta: Mizan.

Lee, Blaine. 2002. *The Power Principle* (TerjemahanAlfinSaputra). Jakarta: Bina Putra Aksara.

Linda Thomson dan Shan Wareing. 2007. *Language, Society, and Power* (Terjemahan Abdul Syukur Ibrahim). Yogyakarta: PUstakaPelajar.

Maran, YohanesLabadanTadjudinNurEfendi. 2006. “DominasaidanKekuasaan Negara danBisnisterhadapPetani (StuditentangProduksidanDistribusiJambu Mete di DesaBalukHering, KecamatanTanjungBunga, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)” dalam*Sosiosains, Vol. 19, No*. *1*.Yogyakarta: Program PascaIlmu-IlmuSosial UGM.

Ramelan, Ratih R.H. 2008. “BahasadanKognisi: StudiKorelasionaltentangPemahamanTeksEkspositoridanBerpikirDeduktifdanInduktifpadaSiswa SMA.” Dalam *Global (jurnalPolitikInternasional), Vol. 9, No.2.* Jakarta: DepartemenIlmuHubunganInternasional FISIP, Universitas Indonesia.

Stone, Clarence. 1998. “Power and Social Complexity”. Dalam Robert J. Waste(Ed.), *Community Power: Directions for Future Research*. London: Sage Publications.

Sutrisno, MudjidanHendarPutranto (Ed.). 2005. *Teori-TeoriKebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Thansoulas, Dimitros. 2001. “Language and Power in Education”. Online diakses 10 April 2012.